

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan merupakan hal yang telah menjamur dan menjadi topik disetiap daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia. Kemiskinan menjadi masalah kemanusiaan yang memberikan hambatan bagi kesejahteraan peradaban. Kemiskinan telah menjadi fenomena global dalam permasalahan sosial-ekonomi, tidak ada satupun negara di dunia saat ini yang terbebas dengan masalah perihal kemiskinan baik tinggi maupun rendah tingkat kemiskinan di suatu negara, fenomena ini akan tetap ada dalam negara tersebut terlebih daerah-daerah yang sulit untuk dikeluarkan dari keadaan kemiskinan yang dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Fenomena kemiskinan ini menjadi penghambat pembangunan ekonomi terutama khususnya pada tingkat daerah terlebih jika fenomena ini tidak kunjung untuk diselesaikan.

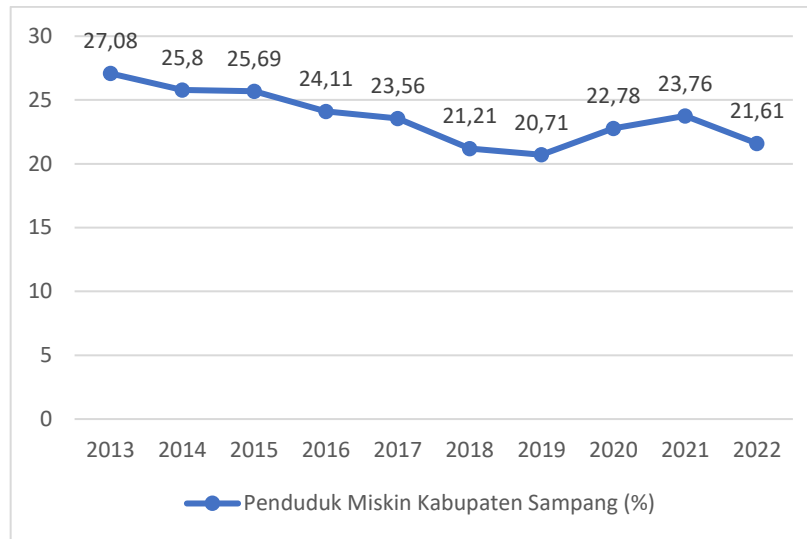
Kemiskinan diinisiasi oleh beberapa faktor yang timbul serta saling berhubungan atau memiliki keterkaitan antar satu sama lainnya, membawa keberlanjutan sosial-ekonomi dalam kondisi krisis. Fenomena kemiskinan ini bisa membawa masalah sosial yang lebih lanjut seperti ketimpangan hak-hak dasar dalam kehidupan yakni kebutuhan, rasa aman, perlindungan hukum, kebutuhan akan pendidikan, keadilan bermasyarakat, kesehatan, berpolitik, dan juga dalam menjalankan kegiatan beragama. Kemiskinan didefinisikan dalam banyak arti, sebagian besar mendeskripsikan kemiskinan dengan kosep dalam aspek ekonomi. Tolak ukur kemiskinan dapat atau tanpa melalui garis kemiskinan (*poverty line*) (Todaro, 2006). Sedangkan menurut Hardinandar (2019), kemiskinan ialah kondisi

individu yang sukar untuk pemenuhan akses kebutuhan dasar layaknya pakaian, tempat tinggal, makanan, serta obat-obatan.

Kemiskinan memberikan gambaran akan kondisi dimana ketiadaan kepemilikan dan rendahnya tingkat pendapatan untuk pemenuhan standar hidup, atau lebih rinci lagi kemiskinan menggambarkan suatu fenomena dimana kondisi seseorang tidak dapat terpenuhi kebutuhan standar hidupnya. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan bahwasannya fenomena kemiskinan merupakan kejadian atas ketidakmampuan tercapainya kebutuhan makanan maupun non-makanan sebagai standar hidup. Mudrajat Kuncoro (1997), keterbatasan akan pemenuhan kebutuhan hidup minimum adalah kemiskinan.

Konsep pendapatan membagi kemiskinan kategori relatif dan absolut, sedangkan skema waktu membagi kemiskinan ke dalam 4 kategori, yakni *Persistent Poverty* yaitu kemiskinan turun menurun atau kondisi miskin kronis, *Cyclical Poverty* yakni kemiskinan yang sejalan dengan perputaran ekonom secara keseluruhan, *Seasonal Poverty* merupakan kemiskinan berpola musiman yang seringkali terbit pada penduduk dengan lapangan pekerjaan tertentu seperti kasus penduduk mata pencaharian pertanian serta nelayan, *Accident Poverty* yakni kondisi yang timbul dari dampak konflik, bencana, atau dampak yang menuju pada degradasi kesejahteraan akibat kebijakan tertentu (Sastraamadja, 2003).

Gambar 1.1 Grafik Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Sampang Tahun 2013-2022 (%)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023 (Data Diolah)

Grafik diatas memproyeksikan Kabupaten Sampang akan presentase penduduk miskinnya pada tahun 2013 hingga tahun 2023, secara statistik presentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang cenderung mengalami degradasi, kondisi ini mengindikasikan Kabupaten Sampang berhasil menekan angka kemiskinannya, akan tetapi yang menarik adalah terjadinya peningkatan presentase penduduk miskin pada rentang tahun 2019-2021, pada rentang tahun tersebut Indonesia terdampak fenomena global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, Kabupaten Sampang juga terkena dampak dari pandemi tersebut seperti yang dapat dilihat pada grafik, presentase penduduk miskin mengalami apresiasi sebesar 2,07% pada 2019-2020, lalu terjadi peningkatan presentase penduduk miskin sebanyak 0,98% pada tahun 2020-2021. Fenomena penambahan presentase penduduk miskin pada rentang waktu pandemi ini sangat mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti bertambahnya penduduk yang kehilangan pekerjaan, terhentinya akses dalam pendidikan, menurunnya tingkat produktivitas, penambahan jumlah penduduk

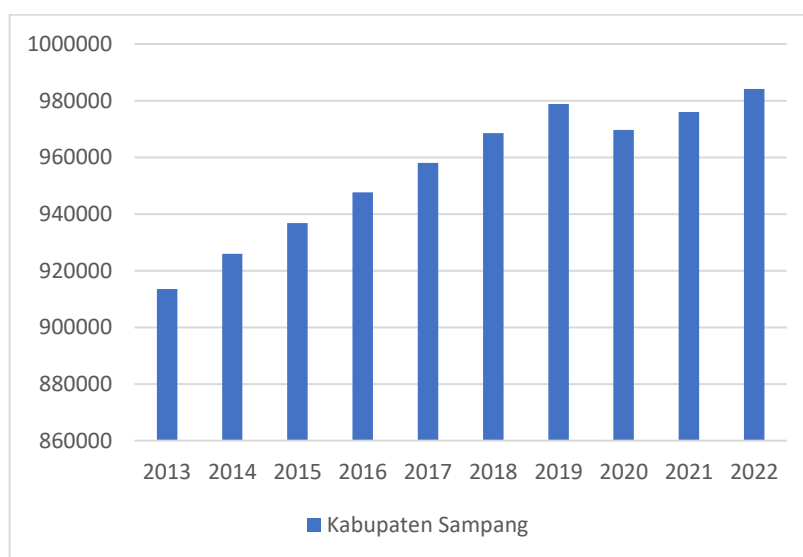
tanpa disertai penambahan produktivitas, dan juga ketidakmampuan upah yang dimiliki penduduk untuk membiayai kebutuhan hidupnya selama pandemi berlangsung.

Kondisi demografi di Indonesia membawa topik sosial-ekonomi yang saling berkesinambungan, jumlah penduduk di Indonesia tidak seluruhnya merata pada tiap-tiap daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota di tiap daerah di Indonesia. Menurut Said (2012) total individu yang tinggal pada suatu wilayah serta merupakan hasil dari demografi yang bersal dari migrasi, kelahiran, maupun kematian disebut sebagai penduduk. Selain dari tingkat fertilitas dan mortalitas, peningkatan jumlah penduduk pada suatu daerah bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang mendukung terjadinya migrasi penduduk, kondisi para penduduk berpindah dari satu wilayah menuju wilayah lain dengan salah satu tujuannya adalah demi memperoleh suatu kesejahteraan sosial dan ekonomi demi kehidupan yang lebih layak.

Keadaan demografi yang tidak merata ini membawa persoalan kemiskinan apabila di suatu daerah mengalami lonjakan kepadatan penduduk secara terus menerus sampai pada batasan yang tidak terkendali, yang menjadikan daerah tersebut jauh dari kesejahteraan. Menurut Sukirno (1997), faktor pendorong pengangguran ialah jumlah penduduk, pendorong ini bisa muncul dari akibat adanya tenaga kerja dan juga bisa diakibatkan karena adanya perluasan pasar, sedangkan perluasan pasar didorong oleh pendapatan masyarakat dan jumlah populasi penduduk.

Di sisi lain, perkembangan penduduk dapat menghambat pembangunan karena kurangnya produktivitas yang akan menyebabkan munculnya pengangguran, dalam hal ini kemiskinan berkaitan dengan jumlah penduduk yang besar dapat memperparah kondisi kemiskinan yang ada.

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang, Tahun 2013-2022 (Juta Jiwa)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023 (Data Diolah)

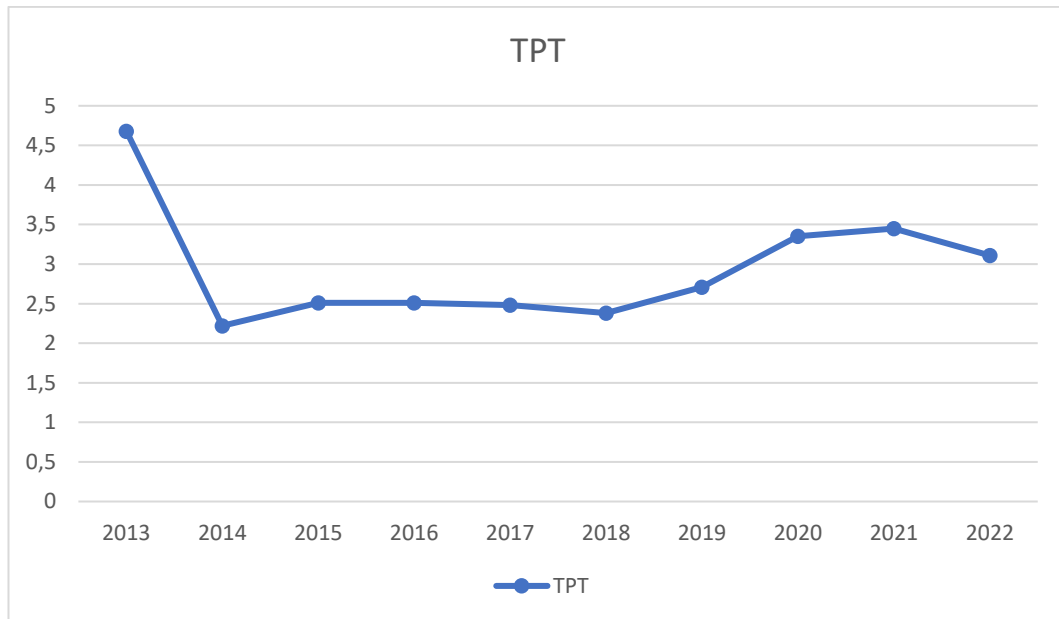
Pada grafik 1.2 menunjukkan Kabupaten Sampang cenderung mengalami pertumbuhan jumlah penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama 10 tahun berturut, Kabupaten Sampang dihuni oleh lebih dari 900.000 ribu penduduk, bahkan selama periode tahun antara 2013-2019, BPS mencatat jumlah penduduk Kabupaten Sampang konsisten mengalami penambahan penduduk yang puncaknya mencapai 978.875 ribu jiwa pada tahun 2019, hal ini dapat membawa indikasi pada fenomena kemiskinan bahwa padatnya kependudukan di Kabupaten sampang memicu kemiskinan, karena padatnya populasi bisa berakibat negatif bagi suatu negara jika kebutuhan hidup akan penduduk dalam daerah tersebut tidak dapat terpenuhi yang berujung pada fenomena kemiskinan. Jumlah penduduk di suatu

wilayah secara berlebihan atau *overpopulation* mengakibatkan penghambatan dalam pembangunan kondisi ekonomi yang lebih baik jika tidak dibarengi oleh penambahan pendapatan dari penduduk itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, yang berujung pada kemiskinan.

Selain jumlah penduduk, pemicu kemiskinan dapat disebabkan oleh produktivitas dari masyarakat yang menempati daerah tersebut, tingkat produktivitas yang rendah mengindikasikan tingginya tingkat pengangguran, sehingga keadaan tanpa pekerjaan ini tidak membentuk masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang berujung pada fenomena kemiskinan. Todaro dan Smith (1998:7) menyatakan penyebab utama negara berkembang terjebak dalam keterbelakangan ialah penyerapan tenaga kerja rendah beriringan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, berujung pada produktivitas rendah menimbulkan pendapatan rendah, hal ini membentuk kemiskinan.

Berdasarkan teori konsumsi yang diungkapkan oleh Keynes, peningkatan pendapatan akan meningkatkan konsumsi masyarakat, kenaikan tingkat konsumsi menunjukkan pencapaian dari kesejahteraan, sehingga teori ini mengindikasikan semakin produktif seseorang maka orang tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan pokok akan standar hidupnya, yang berarti pengangguran yang menjamur akan memperparah fenomena kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan bagaimana tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh masyarakat yang bertempat di suatu daerah, tenaga kerja dengan produktivitas rendah merupakan pemicu utama dari adanya kemiskinan, hal ini selaras dengan pernyataan bahwa kemiskinan dipicu oleh pengangguran yang menjamur.

Gambar 1.3 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sampang, 2013-2022 (%)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023 (Data Diolah)

Grafik diatas menunjukkan tingkat pengangguran di Kabupaten Sampang, keadaan pengangguran di Kabupaten Sampang dalam rentang waktu tahun 2013 hingga 2022 cenderung bertahan serta menginisiasi kenaikan, penambahan jumlah penduduk Kabupaten Sampang tiap tahunnya seharusnya memperparah kondisi pengangguran di Kabupaten Sampang, penurunan tingkat pengangguran ini menunjukkan korelasi kontribusi pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan juga kemampuan masyarakat di Kabupaten Sampang dalam memenuhi permintaan tenaga kerja.

Pada rentang tahun 2019 hingga 2021 keadaan tingkat pengangguran di Kabupaten Sampang mengalami peningkatan, hal ini diakibatkan adanya fenomena global yang melanda sektor kesehatan yang berefek pada penurunan tingkat produktivitas yang berujung pada pemberhentian tenaga kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang membentuk pengangguran baru dan melemahkan

berbagai sektor pendukung ekonomi seperti sektor industri, pertanian, pengolahan dan juga jasa.

Penyebab lain fenomena kemiskinan ialah kurangnya tingkat pendidikan, pendidikan memiliki keterkaitan terhadap fenomena kemiskinan karena pendidikan secara khusus maupun mendasar membawa korelasi terhadap keahlian dan keterampilan serta pengembangan ilmu pengetahuan.

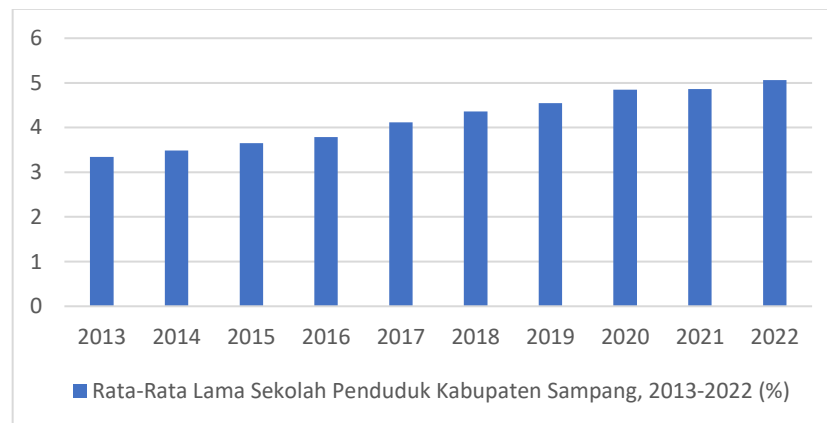
Todaro dan Smith (2015) mengemukakan bahwa pokok dari objektif pembangunan ialah pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan menciptakan kebutaan kemampuan serta pengetahuan sehingga tingkat produktivitas terhambat, hal ini yang membawa diri seseorang menjadi pengangguran dalam masyarakat yang berujung pada penambahan tingkat kemiskinan. Upah tinggi seringkali diterima oleh individu yang menekuni pendidikan lanjut, dikarenakan pekerjaan dengan upah tinggi dapat diakses oleh individu berbekal pendidikan lebih tinggi (*Bureau of Labor Statistics*, 2013). Dengan komperhensifnya pendidikan, fenomena kemiskinan yang terjadi di masyarakat dapat ditekan.

Kemiskinan dapat terus tumbuh dikarenakan kurangnya produktivitas masyarakat itu sendiri sehingga peningkatan pendapatan tidak terjadi, sedangkan dalam berkehidupan, seseorang perlu untuk mengeluarkan sejumlah konsumsi untuk melanjutkan hidupnya, kemampuan konsumsi inilah yang tidak dapat dipenuhi jika seseorang tidak memiliki pendapatan. Melalui pendidikan yang layak, di masa mendatang penduduk miskin mendapatkan kesempatan keluar dari kemiskinannya (Anderson, 2012), karena dengan pendidikan yang tinggi seseorang dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keahliannya sehingga memiliki

kontribusi yang positif bagi perekonomian dan pembangunan dengan bentuk produktivitas sehingga memungkinkan terbebasnya seseorang dari kondisi kemiskinan.

Pendidikan dinilai sebagai jalan untuk mencapai tingkat kesejahteraan sehingga kemiskinan dapat dihindari, dengan pendidikan yang tinggi seseorang diharapkan mengakses pendapatan tinggi sehingga tidak berada dalam masalah pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Gambar 1.4 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Sampang, 2013-2022



Sumber : BPS Kota Surabaya, 2023 (Data Diolah)

Gambar 1.7 menampilkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sampang sebagai bentuk partisipasi penduduk Kabupaten Sampang dalam pendidikan, berpaku pada data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, rata-rata lama penduduk Kabupaten Sampang dalam menempuh pendidikan adalah sekitar 3 hingga 5 tahun lamanya, hal ini belum mencapai target wajib belajar dari program pemerintah, yang dimana pemerintah menargetkan kepada rakyat Indonesia setidaknya menempuh pendidikan selama 12 tahun.

Beberapa upaya pemerintah saat ini dalam penyuksesan program wajib belajar 12 tahun adalah melalui pemberian bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), selain itu terkhusus untuk masyarakat yang tertimpa kemiskinan pemerintah memberikan penyesuaian program agar masyarakat miskin ikut serta mengenyam pendidikan yang ideal melalui keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) melalui penyaluran Kartu Indonesia Pintar. Pada tingkat makro, pemerintah menilai bantuan sebagai investasi pada instrumen pendidikan, sesuai dengan Psacharopoulos (1985) menyatakan bahwa investasi modal manusia melalui konsumsi pendidikan bukanlah pengeluaran semata. Todaro dan Smith (2015) mengungkapkan bahwa mencapai kehidupan yang baik dapat melalui hal pokok yakni pendidikan dan kesehatan sebagai inti kesejahteraan. Pendidikan berperan vital memupuk kemampuan perekonomian seseorang yang sejahtera. Pengetahuan, keahlian, serta produktivitas suatu individu turut meningkat selaras dengan level pendidikan individu tersebut, dengan pendidikan yang memadai dapat memainkan peran utama dalam pemanfaatan teknologi, informasi, serta sumber daya alam untuk menghasilkan *output* yang dapat menunjang pendapatannya, selain itu dalam kehidupan peranan pendidikan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, sejatinya kemiskinan di Kabupaten Sampang menunjukkan perbaikan diungkapkan oleh turunnya presentase penduduk miskin, kendati demikian kuantitas penduduk di Kabupaten Sampang cukup fluktuatif cenderung bertambah dari tahun ke tahun, sedangkan tingkat pengangguran di Kabupaten Sampang dalam rentang tahun 2008 hingga 2022 cenderung menurun yang menandakan efektivitas pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran,

akan tetapi menurut Badan Pusat Statistik di Kabupaten Sampang, tingkat pendidikan berdasarkan rata-rata lama sekolah belum menyentuh target 12 tahun dan cenderung sangat rendah yang mengindikasikan ketimpangan dalam pendidikan, sehingga penulis mengkaji fenomena yang timbul di Kabupaten Sampang. Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait “ Analisis Pangaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang”

1.2 Rumusan Masalah

Penguraian latar belakang penelitian, memunculkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang?
2. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang?
3. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penguraian latar belakang penelitian memperoleh tujuan dilakukannya penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian bertujuan analisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang
2. Penelitian bertujuan analisis pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang

3. Penelitian bertujuan analisis pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ditetapkan ruang lingkungnya bersumber dari latar belakang penelitian, agar penelitian memiliki arah. Maka sebab itu didapatkan penelitian Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan dengan studi pada Kabupaten Sampang selama periode tahun 2008-2022

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berupa :

1. Bagi peneliti, diharapkan menemukan pengaruh dari variabel penelitian terhadap fenomena Kemiskinan dan menjadi sarana wawasan serta pengetahuan lanjut dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
2. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi bahanj kajian sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki korelasi sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam penelitian
3. Bagi pihak lembaga terkait, yakni Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menyusun dan merencanakan kebijakan pembangunan daerah terutama dalam perekonomian, dengan menyusun kebijakan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan.